



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA HUKUM DAN HAM**



LAPORAN KEUANGAN

TRIWULAN III



ESELON I

2024

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPSDM Hukum dan HAM adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPSDM Hukum dan HAM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPSDM Hukum dan HAM. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Depok, 27 Oktober 2024
Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Razilu

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Pernyataan Tanggung Jawab	III
Ringkasan	IV
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	4
V. Catatan atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	16
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	28
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	43
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	51
F. Pengungkapan Penting Lainnya	54
VI. Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Depok, 27 Oktober 2024
Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Razilu

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Triwulan III Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.120.798.539,00 dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp996.300.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp181.829.367.627,00 atau mencapai 34% dari alokasi anggaran sebesar Rp322.216.750.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 September 2024. Nilai Aset per 30 September 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.509.203.337.777,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp3.391.875.780,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.505.142.240.933,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp669.221.064,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp8.447.530.614,00 dan Rp1.500.755.807.163,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2024 adalah sebesar Rp1.550.261.453,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp176.835.924.083,00 sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp175.285.662.630,00). Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp302.752.532,00 dan (Rp174.982.910.098,00) sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp174.982.910.098,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal periode yang berakhir per 30 September 2024 adalah sebesar Rp1.494.896.543.769,00 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp174.982.910.098,00) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai (Rp89.138.314,00) dan transaksi antar entitas senilai Rp180.931.311.806,00 kenaikan/penurunan ekuitas Rp5.859.263.394,00 sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 30 September 2024 adalah senilai Rp1.500.755.807.163,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		%	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		996.300.000	2.120.798.539	213	1.511.599.550
JUMLAH PENDAPATAN		996.300.000	2.120.798.539	213	1.511.599.550
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	38.139.257.000	28.835.503.863	76	26.260.913.299
Belanja Barang	B.4	193.944.715.000	128.066.467.616	66	151.143.800.836
Belanja Modal	B.5	90.132.778.000	24.927.396.148	28	11.246.424.060
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		322.216.750.000	181.829.367.627	56	188.651.138.195

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM NERACA PER 30 SEPTEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	762.770.897	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	1.927.721.167	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	186.800	329.520.029
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.5		(1.647.600)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)		186.800	327.872.429
Belanja Dibayar di Muka	C.6	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.7	-	-
Persediaan	C.8	701.196.916	399.048.889
Jumlah Aset Lancar		3.391.875.780	726.921.318
ASET TETAP			
Tanah	C.9	1.089.000.068.000	1.089.000.068.000
Peralatan dan Mesin	C.10	126.737.952.828	121.589.324.040
Gedung dan Bangunan	C.11	410.958.372.045	378.280.318.966
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.12	13.275.880.497	12.401.733.397
Aset Tetap Lainnya	C.13	3.176.728.792	3.215.178.792
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.14	16.758.876.814	26.675.304.285
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.15	(154.765.638.043)	(144.648.414.799)
Jumlah Aset Tetap		1.505.142.240.933	1.486.513.512.681
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.16	3.128.855.133	3.157.897.433
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.17	-	12.391.866.906
Aset Lain-Lain	C.18	9.327.849.337	8.053.909.538
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.19	(11.787.483.406)	(10.499.810.188)
Jumlah Aset Lainnya		669.221.064	13.103.863.689
JUMLAH ASET		1.509.203.337.777	1.500.344.297.688
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.20	762.770.897	-
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.21	5.879.133.839	5.386.205.244
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.22	1.804.505.843	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.23	-	61.548.675
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.24	1.120.035	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		8.447.530.614	5.447.753.919
JUMLAH KEWAJIBAN		8.447.530.614	5.447.753.919
EKUITAS			
Ekuitas	C.25	1.500.755.807.163	1.494.896.543.769
JUMLAH EKUITAS		1.500.755.807.163	1.494.896.543.769
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.509.203.337.777	1.500.344.297.688

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.550.261.453	1.062.723.150
JUMLAH PENDAPATAN		1.550.261.453	1.062.723.150
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	31.162.096.027	28.338.036.127
Beban Persediaan	D.3	1.217.294.505	731.068.644
Beban Barang dan Jasa	D.4	90.007.287.285	108.312.646.067
Beban Pemeliharaan	D.5	12.294.336.791	7.458.931.990
Beban Perjalanan Dinas	D.6	27.251.992.091	38.798.405.790
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	14.904.564.984	13.678.949.278
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	(1.647.600)	-
Beban Lain-lain	D.11		
JUMLAH BEBAN		176.835.924.083	197.318.037.896
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(175.285.662.630)	(196.255.314.746)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12	-	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nonlancar		180.060.099	(1.198.966.902)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		180.060.099	94.897.664
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	1.293.864.566
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non operasionalLain		122.692.433	454.720.803
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		122.692.433	454.720.803
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		302.752.532	(744.246.099)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(174.982.910.098)	(196.999.560.845)
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(174.982.910.098)	(196.999.560.845)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	1.494.896.543.769	1.454.096.342.965
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(174.982.910.098)	(196.999.560.845)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		(89.138.314)	216.405.631
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.4		
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.5	(89.138.314)	216.405.631
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
LAIN-LAIN		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	180.931.311.806	187.139.538.645
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		5.859.263.394	(9.643.616.569)
EKUITAS AKHIR	E.5	1.500.755.807.163	1.444.452.726.396

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

Dasar Hukum BPSDM Hukum dan HAM merupakan ujung tombak organisasi
Entitas dan Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal pengembangan Aparatur
Rencana Strategis Hukum dan HAM, sehingga organisasi ini dituntut untuk dapat
memenuhi berbagai kebutuhan pengembangan pengetahuan,
keterampilan dan sikap ASN agar dapat melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan di bidang hukum dan HAM dengan sebaik-baiknya.

Kementerian Hukum dan HAM merupakan Kementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kementerian Hukum dan HAM memiliki lingkup kerja yang sangat beragam, seperti bidang pemasyarakatan, bidang keimigrasian, bidang kekayaan intelektual, bidang administrasi hukum umum, pembinaan hukum nasional, peraturan perundang-undangan, penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan (P5) hak asasi manusia. Keragaman dan kompleksitas tugas ini tentunya memerlukan berbagai kecakapan dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif maupun teknis yang didasari oleh Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di bidang hukum dan HAM, dengan lebih cepat (*faster*), lebih baik (*better*), lebih murah (*cheaper*), dan terbaru (*newer*).

Permasalahan hukum dan HAM di Indonesia semakin dinamis dan kompleks. Masyarakat saat ini memiliki pemahaman dan daya kritis yang cukup tinggi di bidang hukum dan HAM. Perhatian dan tuntutan masyarakat terhadap permasalahan pelayanan tahanan dan warga binaan pemasyarakatan, pelayanan keimigrasian, pelayanan kekayaan intelektual, pelayanan jasa hukum dan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan (P5) HAM serta tugas Kementerian Hukum dan HAM lainnya, sehingga bila tidak diantisipasi dan direspon dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel, akan dapat

memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, pegawai Kementerian Hukum dan HAM dan pihak lain yang melaksanakan tugas di bidang hukum dan HAM, dituntut untuk senantiasa mengembangkan kompetensi dan profesionalismenya dalam pelaksanaan tugasnya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Kondisi di atas menjadi tantangan bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM untuk mewujudkan seluruh SDM Hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pelatihan teknis substantif, teknis fungsional dan pelatihan hak asasi manusia.

Selain menyelenggarakan kegiatan diklat, BPSDM Hukum dan HAM juga melaksanakan *assessment center* untuk mendapatkan informasi dan pemetaan kompetensi (*soft competency*) yang dimiliki pegawai Kementerian Hukum dan HAM, dan yang dapat digunakan sebagai informasi yang memadai bagi pimpinan untuk keperluan promosi, rotasi, mutasi, pengembangan SDM untuk pembinaan karir pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugasnya juga bertanggung jawab meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Sumber Daya Manusia bukan saja bagi pegawai Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM yang berada di instansi lain antara lain perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, aparat penegak hukum lainnya untuk Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Sebagai konsekuensi transformasi organisasi, ke depannya BPSDM Hukum dan HAM harus mampu mengantisipasi tantangan tugas pengembangan SDM Hukum dan HAM yang semakin kompleks dalam menghadapi dinamika persoalan hukum dan HAM masyarakat Indonesia dan internasional. Melalui transformasi organisasi ini, diharapkan kegiatan pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM dapat lebih implementatif, adaptif (*relevant*), mudah diakses, dan berdampak tinggi.

Tujuan :

“Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia”

Sasaran :

-
- Seluruh aparatur Hukum dan HAM memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas.
 - Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi berkesinambungan.

Kedudukan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 900).

*Pendekatan**Penyusunan**Laporan Keuangan***A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Triwulan III Tahun 2024 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Entitas akuntansi di lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM berjumlah 6 (enam) entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-E1

No	Kode Es I	Entitas	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM	1	-	-	-	1
2	12	Politeknik Imigrasi	1	-	-	-	1
3	12	Politeknik Ilmu Pemasarakatan	1	-	-	-	1
4	12	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau	-	1	-	-	1
5	12	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah	-	1	-	-	1
6	12	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara	-	1	-	-	1
Jumlah			3	3	-	-	6

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

A.5. Kebijakan Akuntansi

Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- d. Pendapatan Lain-lain

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan

dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan atas
Pos Laporan
Realisasi
Anggaran

Selama periode Triwulan III Tahun Anggaran 2024, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi yang dilakukan berupa revisi dengan kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran, Kanwil Perbendaharaan, dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran serta merubah jumlah PAGU Anggaran DIPA awal. Perincian Anggaran awal dan setelah revisi berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2024

URAIAN	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	996.300.000	996.300.000
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	996.300.000	996.300.000
Belanja		
Belanja Pegawai	34.767.519.000	38.139.257.000
Belanja Barang	183.123.669.000	193.944.715.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Belanja Modal	89.659.604.000	90.132.778.000
Jumlah Belanja	307.550.792.000	322.216.750.000

B.1 PENDAPATAN

Realisasi
Pendapatan
Rp2.120.798.539,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 adalah sebesar Rp2.120.798.539,00 atau mencapai 212,87% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp996,300.000,00. Pendapatan lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	90.000.000	400.408.980	444,90
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	906.300.000	906.300.000	100,00
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan	-	70.114.000	-
Pendapatan Denda	-	362.063.897	-
Pendapatan Lain-lain	-	381.911.662	-
Jumlah	996.300.000	2.120.798.539	212,87

Realisasi Pendapatan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 40,30% dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada TA 2023. Hal ini disebabkan karena pendapatan dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan Tahun 2023.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 2024	REALISASI 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	400.408.980	146.570.970	173,18
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	906.300.000	906.300.000	-
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	70.114.000	4.194.577	94
Pendapatan Denda	362.063.897	-	-
Pendapatan Lain-lain	381.911.662	454.534.003	(15,98)
Jumlah	2.120.798.539	1.511.599.550	40,30

Rincian Realisasi Pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha (4251) sebesar Rp400.408.980,00 terdiri dari :
 - Realisasi akun (425122) Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp65.755.000,00 berasal dari Satker BPSDM Hukum dan HAM yang merupakan pendapatan dari hasil lelang peralatan dan mesin;
 - Realisasi akun (425129) sebesar Rp114.305.099,00 berasal dari satker BPSDM Hukum dan HAM berupa lelang 3 mobil kendaraan dinas.
 - Realisasi akun (425131) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp220.348.881,00 berasal dari:
 - a. Satker BPSDM sebesar Rp220.314.000,00 atas sewa Auditorium, sewa Kamar Flat, sewa Kamar Asrama, sewa Ruang Kantin.
 - b. Satker Poltekim sebesar Rp34.881,00 merupakan pendapatan atas sewa rumah dinas untuk Direktur Politeknik Imigrasi 1 periode.
2. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (4254) pada satker BPSDM Hukum dan HAM berupa realisasi akun (425421) Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan merupakan pendapatan atas Pelatihan Jabatan Fungsional Penyusun dan Perancang Perundang-undangan sebesar Rp906.300.000,00

3. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan (4257) pada satker Poltekim berupa realisasi akun (425765) Pendapatan dari penutupan rekening sebesar Rp70.114.000,00 yang merupakan pengembalian dana pendidikan karena terdapat 2 (dua) orang pegawai Taruna Tingkat I yg mengundurkan diri.
4. Pendapatan Denda (4258) berupa realisasi Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811) sebesar Rp362.063.897,00 terdapat pada :
 - Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp355.475.097,00 merupakan Denda Penyelesaian Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Rektorat Akademik BPSDM Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.186.430,00 dan Denda Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Rektorat Akademik Termin V BPSDM Hukum dan HAM-Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp342.288.667,00.
 - Satker POLTEKIM sebesar Rp1.388.800,00 dikarenakan terdapat pekerjaan kontrak Pengadaan Lemari Kayu untuk asrama taruna yg melewati batas waktu (denda) pekerjaan selama 16 hari kalender.
 - Satker Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebesar Rp5.200.000,00 merupakan denda keterlambatan pekerjaan pembangunan Asrama 2 Lantai dan Gedung Serbaguna 2 Lantai pada Balai Pendidikan Hukum dan HAM Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021.
5. Pendapatan Lain-Lain (4259) sebesar Rp381.911.662,00 terdiri dari:
 - Terdapat realisasi akun (425911) Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp15.649.291,00 yang terdiri dari :
 - a. Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp13.964.000,00 pengembalian atas kelebihan pembayaran gaji sebanyak 1 (satu) orang pegawai periode Juni-September 2018 karena sedang CLTN.
 - b. Satker Poltekip sebesar Rp4.091,00 berupa Komponen kekurangan KGB/ Gaji.

- c. Satker Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebesar Rp1.681.200,00 Komponen kekurangan KGB/ Gaji.
- Terdapat realisasi akun (425912) Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp35.022.593,00 terdapat pada satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp35.022.593,00 yang merupakan pengembalian sewa mobil sebesar Rp33.842.342,00 dan kelebihan pemeliharaan Rp1.180.251,00.
- Terdapat realisasi akun (425913) Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp331.239.778,00 yang terdiri dari :
 - a. Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp323.941.583,00 Penyetoran kembali ke kas negara atas kelebihan belanja modal Gedung rektorat sebesar Rp238.009.337,00 dan Lapangan tenis *indoor* sebesar Rp85.932.246,00.
 - b. Satker Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah sebesar Rp4.398.195,00 atas Kelebihan Pembayaran Belanja Modal atas kelebihan volume pekerjaan Sarana Olahraga Outdoor, Rumah Negara dan Kolam Retensi Balai Diklat Kumham Jawa Tengah TA. 2023.
 - c. Satker Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebesar Rp2.900.000,00 merupakan kelebihan pembayaran kepada PT.Trikarsa Utama Lestari total atas pekerjaan pembangunan asrama 2 (dua) lantai dan gedung serbaguna 2 (dua) lantai yang tidak sesuai spesifikasi kontrak dan denda keterlambatan.

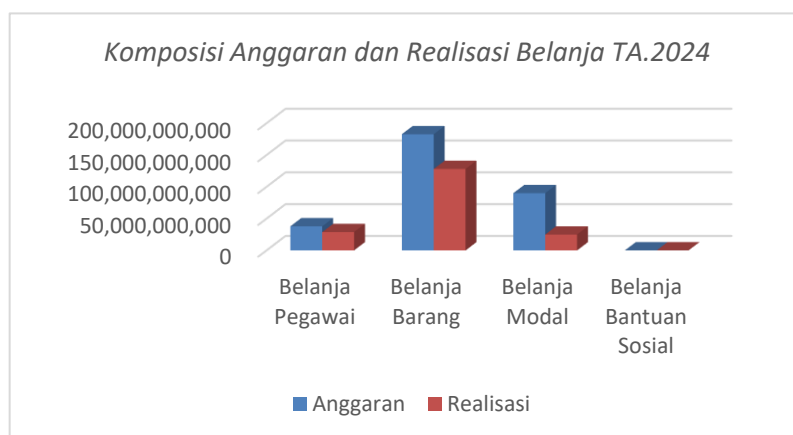
B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Realisasi Belanja pada 30 September 2024 adalah sebesar Rp181.829.367.627,00 atau 56,43% dari anggaran belanja sebesar Rp322.216.750.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

URAIAN	TA 2024		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	38.139.257.000	28.849.684.823	75,64
Belanja Barang	193.944.715.000	128.066.667.616	66,03
Belanja Modal	90.132.778.000	24.927.396.148	27,66
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	322.216.750.000	181.843.748.587	56,44
Pengembalian Belanja		(14.380.960)	-
Total Belanja	322.216.750.000	181.829.367.627	56,43

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2024, realisasi belanja pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar 3,62%.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

URAIAN	Realisasi 2024	Realisasi 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	28.835.503.863	26.260.913.299	9,80
Belanja Barang	128.066.467.616	151.143.800.836	(15,27)
Belanja Modal	24.927.396.148	11.246.424.060	121,65
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	181.829.367.627	188.651.138.195	(3,62)

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp28.835.503.863,
00

Realisasi Belanja Pegawai Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dan Triwulan III Tahun Anggaran 2023 adalah masing-masing sebesar Rp28.835.503.863,00 dan Rp26.260.913.299,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai Triwulan III Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar 9,80% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya pegawai yang mutasi keluar ataupun masuk BPSDM Hukum dan HAM, pegawai yang menerima kenaikan pangkat dan pegawai yang mutasi menjadi JFT.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

URAIAN	Realisasi 2024	Realisasi 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	27.049.640.588	25.475.017.326	6,18
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	604.335.235,00	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	1.195.709.000	787.380.000,00	51,86
Belanja Tunj.Khusus & Belanja Pegawai Transito	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	28.849.684.823	26.262.397.326	9,85
Pengembalian Belanja Pegawai	(14.180.960)	(1.484.027)	855,57
Jumlah Belanja	28.835.503.863	26.260.913.299	9,80

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai per 30 September 2024

Kode	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	24.454.482.000	18.975.723.080	6.373.200	18.969.349.880	77,60
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	383.000	295.781	10.760	285.021	77,23
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.554.630.000	1.197.174.970	637.320	1.196.537.650	77,01
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	432.122.000	330.575.424	-	330.575.424	76,50
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	543.635.000	439.125.000	-	439.125.000	80,78
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2.732.479.000	2.153.326.000	370.000	2.152.956.000	78,80
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	341.071.000	288.528.123	-	288.528.123	84,59
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1.138.843.000	908.388.210	289.680	908.098.530	79,76
511129	Belanja Uang Makan PNS	3.655.028.000	2.332.879.000	-	2.332.879.000	63,83
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	540.441.000	423.625.000	6.500.000	417.125.000	78,39
512211	Belanja Uang Lembur	1.681.766.000	1.184.107.000	-	1.184.107.000	70,41
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	637.648.000	446.352.900		446.352.900	70,00
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9.000	4.995		4.995	55,50
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	21.318.000	14.921.900		14.921.900	70,00
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	5.668.000	3.967.200		3.967.200	69,99
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	61.750.000	43.225.000		43.225.000	70,00
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	26.072.000	18.249.840		18.249.840	70,00
511628	Belanja Uang Makan PPPK	144.872.000	77.613.000		77.613.000	53,57
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	167.040.000	11.602.000	-	11.602.000	6,95
JUMLAH		38.139.257.000	28.849.684.423	14.180.960	28.835.503.463	75,64

Pada laporan realisasi anggaran yang berakhir per 30 September TA 2024 terdapat pengembalian belanja sebesar Rp14.180.960,00 dengan rincian:

- Satker BPSDM sebesar Rp14.177.790,00 atas belanja gaji pokok PNS, tunjangan suami/istri PNS, pembulatan gaji PNS, tunjangan fungsional PNS, tunjangan beras PNS, dan tunjangan umum PNS.
- Satker Poltekim sebesar Rp2.393,00 atas belanja pembulatan gaji PNS.
- Satker Balai Diklat Kepulauan Riau sebesar Rp631,00 atas pengembalian pembulatan gaji PNS.
- Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp146,00 atas pembulatan gaji pokok PNS.

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang Realisasi Belanja Barang Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dan Rp128.066.467.616, Triwulan III Tahun Anggaran 2023 adalah masing-masing sebesar 00 Rp128.066.467.616,00 dan Rp151.143.800.836,00.

Realisasi Belanja Barang Triwulan III Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar 15,27% dari Triwulan III TA 2023.

*Perbandingan Realisasi Belanja Barang
TA 2024 dan 2023*

URAIAN	Realisasi 2024	Realisasi 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	19.221.528.088	12.665.349.150	51,76
Belanja Barang Non Operasional	46.248.595.776	70.839.292.147	(34,71)
Belanja Persediaan	904.478.465	670.331.891	34,93
Belanja Jasa	22.175.152.474	21.105.673.082	5,07
Belanja Pemeliharaan	12.648.001.465	7.241.233.429	74,67
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	26.868.911.348	38.634.009.151	(30,45)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	128.066.667.616	151.155.888.850	(15,28)
Pengembalian Belanja	(200.000)	(12.088.014)	
Jumlah Belanja	128.066.467.616	151.143.800.836	(15,27)

Realisasi Anggaran Belanja Barang per 30 September 2024

Kode	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
5211	Belanja Barang Operasional	27.645.923.000	19.221.528.088	-	19.221.528.088	69,53
5212	Belanja Barang Non Operasional	69.625.918.000	46.248.595.776	-	46.248.595.776	66,42
5218	Belanja Barang Persediaan	1.659.983.000	904.478.465	-	904.478.465	54,49
5221	Belanja Jasa	34.724.836.000	22.175.152.474	-	22.175.152.474	63,86
5231	Belanja Pemeliharaan	15.952.887.000	12.648.001.465	-	12.648.001.465	79,28
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	44.335.168.000	26.868.911.348	200.000	26.868.711.348	60,60
		193.944.715.000	128.066.667.616	200.000	128.066.467.616	66,03

Pada laporan realisasi belanja barang terdapat Pengembalian akun Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241) sebesar Rp200.000,00 terdapat pada satker BPSDM Hukum dan HAM dari belanja perjalanan dinas biasa.

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp24.927.396.148,
00

Realisasi Belanja Modal Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dan Triwulan III Tahun Anggaran 2023 adalah masing-masing sebesar Rp24.927.396.148,00 dan Rp11.246.424.060,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar 121,65% dibandingkan Triwulan III Tahun Anggaran 2023 hal ini dikarenakan realisasi belanja modal pembangunan Gedung Rektorat Politeknik Tangerang pada Satker

BPSDM Hukum dan HAM, penambahan nilai gedung dan bangunan pada Balai Diklat Kepulauan Riau, dan percepatan realisasi peralatan dan mesin pada Balai Diklat Sulawesi Utara.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2024 dan 2023*

URAIAN	Realisasi 2024	Realisasi 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.686.110.105	6.429.363.175	19,55
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.241.286.043	4.777.389.235	260,89
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	39.671.650	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	24.927.396.148	11.246.424.060	121,65
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	24.927.396.148	11.246.424.060	121,65

*Rincian Realisasi Belanja Barang Modal
per 30 September 2024*

Kode	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
5311	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.653.614.000	7.686.110.105	-	7.686.110.105	79,62
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.479.164.000	17.241.286.043	-	17.241.286.043	21,42
5361	Belanja Modal Lainnya	-	-	-	-	-
		90.132.778.000	24.927.396.148	0	24.927.396.148	27,66

*Belanja Modal
Tanah
Rp0,00*

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dan Triwulan III Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp0,00.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp7.686.110.105,
00*

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Triwulan III Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp7.686.110.105,00 mengalami kenaikan sebesar 19,55% bila dibandingkan dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.429.363.175,00. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor serta penambahan dan peremajaan peralatan dan mesin yang sudah rusak untuk menunjang kinerja pegawai.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2024 dan 2023*

URAIAN	Realisasi 2024	Realisasi 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.686.110.105	6.429.363.175	19,55
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal BLU	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	7.686.110.105	6.429.363.175	19,55
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	7.686.110.105	6.429.363.175	19,55

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan*

*Rp17.241.286.043,
00*

Realisasi Belanja Modal Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dan Triwulan III Tahun Anggaran 2023 adalah masing-masing sebesar Rp17.241.286.043,00 dan Rp4.777.389.235,00.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.792.047.521	3.457.293.729	386
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	449.238.522	1.320.095.506	(66)
Jumlah Belanja Kotor	17.241.286.043	4.777.389.235	260,89
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	17.241.286.043	4.777.389.235	260,89

Realisasi Belanja Modal 30 September TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 260,89% dikarenakan belanja modal pembangunan gedung rektorat politeknik di Tangerang, renovasi gedung kantor Balai Diklat Kepri.

*Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 30 September 2024*

Kode	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.000.000.000	16.792.047.521	-	16.792.047.521	20,99
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	479.164.000	449.238.522	-	449.238.522	93,75
		80.479.164.000	17.241.286.043	0	17.241.286.043	21,42

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Rp0,00*

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dan Triwulan III Tahun Anggaran 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

*Belanja Modal
Lainnya
Rp0,00*

Realisasi Belanja Modal Lainnya 30 September TA 2024 dan 30 September TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp39.671.650,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik (Turun) %
Belanja <i>Software</i>	-	34.714.000	(100,00)
Belanja Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	-	4.957.650	0,00
Belanja Modal BLU	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	-	39.671.650	(100,00)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00
Jumlah Belanja	-	39.671.650	(100,00)

B.6 Belanja Bantuan Sosial

*Belanja Bantuan
Sosial
Rp0,00*

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dan Triwulan III Tahun Anggaran 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp762.770.897,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp762.770.897,00 dan Rp0,00 merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran

TA 2024 dan 2023

Keterangan	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran	722.800.000	-
Kas dibendahara Pengeluaran (TUP)	39.970.897	-
Jumlah	762.770.897	-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

TA 2024 dan TA 2023

Keterangan	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	-	-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp1.927.721.167,00

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.927.721.167,00 dan Rp0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas
TA 2024 dan 2023*

Keterangan	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1.927.721.167	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	1.927.721.167	-

C.4 Piutang Bukan Pajak

Piutang PNB
Pi186.800,00

Saldo Piutang PNB per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp186.800,00 dan Rp327.872.429,00. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Piutang PNB
TA 2024 dan 2023*

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Piutang PNB	186.800	329.520.029
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	-	(1.647.600)
Jumlah	186.800	327.872.429

C.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih–Piutang
Lancar
Rp0,00*

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00. Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar
Triwulan III TA 2024*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,00%	-
Jumlah	-	0,00%	-

C.6 Belanja Dibayar di Muka

*Belanja Dibayar
Dimuka
Rp0,00*

Saldo Beban Dibayar di Muka 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2024 dan 2023

JENIS	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Pembayaran Internet	-	-
Koreksi nilai aset tetap non revaluasi	-	-
Pembayaran Sewa Gedung dan Bangunan	-	-
Jumlah	-	-

C.7 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

*Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima
Rp0,00*

Pendapatan yang Masih Harus Diterima 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

C.8 Persediaan

*Persediaan
Rp701.196.916,00*

Nilai Persediaan 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp701.196.916,00 dan Rp399.048.889,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023

JENIS	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Barang Konsumsi	594.571.111	389.158.389
Barang untuk Pemeliharaan	102.225.805	5.490.500
Amunisi	4.400.000	4.400.000
Jumlah	701.196.916	399.048.889

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.9 Tanah

Tanah
Rp1.089.000.068.
000,00

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.1.089.000.068.000,00. Aset Tetap Tanah terdiri dari :

- Luas Tanah BPSDM Hukum dan HAM secara keseluruhan 103.770 m² terletak di Jl. Raya Gandul No.4 Cinere, Depok.
- Tanah seluas 2.559 m² terletak di Jl. Percetakan Negara VII No.27, Rawasari, Jakarta Pusat.
- Aset tanah pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Sulawesi Utara Tanah seluas 3.000m² yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara terletak di Jl. Manembo-nembo Kel. Sagerat Weru Dua Kec. Matuari Kota Bitung Sulawesi Utara.
- Aset tanah pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Jawa Tengah Tanah seluas 51.604m² yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terletak di Jl. Muhammad Ihksan, Semarang Jawa Tengah.
- Penambahan aset tanah lainnya pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepulauan Riau seluas 40.000m² yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau terletak di Telaga Punggur – Pantai Timur Kabil Batam dimana status kepemilikan dalam proses sertifikasi Balik Nama di BPN.

Saldo Tanah per 30 September 2024 sebesar Rp1.089.000.068.000,00 berasal dari :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp687.998.681.000;
- Satker Poltekip sebesar Rp58.851.882.000,00;
- Satker Balai Diklat Kepulauan Riau sebesar Rp16.773.700.000,00;
- Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp323.737.178.000,00;
- Satker Balai Diklat Sulawesi Utara sebesar Rp1.638.627.000,00.

C.10 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin

Rp126.737.952.828,00

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp126.737.952.828,00 dan Rp121.589.324.040,00.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2024	Rp 121.589.324.040
Mutasi tambah:	10.483.213.023
Saldo Awal	960.415.550
Pembelian	7.686.110.105
Transfer masuk	1.351.716.000
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	163.242.000
Reklasifikasi Masuk	321.729.368
Mutasi kurang:	5.334.584.235
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	1.072.830.000
Reklasifikasi Keluar	33.448.000
Transfer Keluar	707.387.863
Penghentian aset dari penggunaan	3.520.918.372
Saldo per 30 September 2024	Rp 126.737.952.828
Akumulasi Penyusutan s.d.30 September 2024	Rp (87.389.404.138)
Nilai Buku per 30 September 2024	Rp 39.348.548.690

Mutasi bertambah sebesar Rp10.483.213.023,00 mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai berasal dari :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp6.088.072.655,00;
- Satker Poltekim sebesar Rp417.400.000,00;
- Satker Poltekip sebesar Rp1.600.805.000,00;
- Satker Badiklat Kepulauan Riau sebesar Rp923.850.000,00;
- Satker Badiklat Jawa Tengah senilai Rp148.511.000,00
- Satker Badiklat Sulawesi Utara senilai Rp1.304.574.368,00.

Mutasi kurang sebesar Rp5.334.584.235,00 mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai berasal dari :

- Satker BPSDM sebesar Rp1.098.915.000,00;
- Satker Poltekim sebesar Rp3.227.474.872,00;
- Satker Poltekip sebesar Rp440.455.000,00;
- Satker Badiklat Kepulauan Riau sebesar Rp434.608.495,00;
- Satker Badiklat Sulawesi Utara sebesar Rp133.130.868,00.

Saldo Peralatan dan Mesin per 30 September 2024 sebesar Rp126.737.952.828,00 berasal dari :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp88.682.748.803,00;
- Satker Poltekim sebesar Rp9.980.290.805,00;
- Satker Poltekip sebesar Rp10.778.734.444,00;
- Satker Badiklat Kepulauan Riau sebesar Rp4.454.392.040,00;
- Satker Badiklat Jawa Tengah senilai Rp7.729.356.811,00
- Satker Badiklat Sulawesi Utara senilai Rp5.112.429.925,00.

C.11 Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
Rp410.958.372.045,
00

Saldo gedung dan bangunan per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp410.958.372.045,00 dan Rp378.280.318.966,00.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2024	378.280.318.966
Mutasi tambah:	34.703.876.479
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	34.137.991.957
Pengembangan Nilai Aset Langsung	85.150.000
Pembelian	116.646.000
Koreksi pencatatan nilai bertambah	116.646.000
Penambahan nilai GB	247.442.522
Mutasi kurang:	2.025.823.400
Koreksi susulan	942.680.300
Koreksi pencatatan nilai berkurang	1.083.143.100
Saldo per 30 September 2024	410.958.372.045
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2024	(58.067.153.202)
Nilai Buku per 30 September 2024	352.891.218.843

Terdapat nilai Mutasi Tambah sebesar Rp34.137.991.957,00 berasal dari Satker BPSDM Hukum dan HAM berupa Penyelesaian Pembangunan dengan KDP.

Terdapat Nilai Mutasi Kurang Rp2.025.823.400,00 berasal dari :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp1.909.177.400,00 berupa koreksi susulan dan koreksi pencatatan nilai berkurang;

- Satker Badiklat Jawa Tengah sebesar Rp116.646.000,00 berupa koreksi pencatatan nilai berkurang.

Saldo Gedung dan Bangunan per 30 September 2024 sebesar Rp410,958,372,045,00 terdiri dari :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp331.773.750.357,00;
- Satker Poltekop sebesar Rp5.140.133.032,00;
- Satker Balai Diklat Kepulauan Riau sebesar Rp13.160.487.057,00;
- Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp48.754.739.295,00;
- Satker Balai Diklat Sulawesi Utara sebesar Rp12.129.262.304,00.

C.12 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp13.275.880.497,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.275.880.497,00.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2024	12.401.733.397
Mutasi tambah:	2.181.319.100
Saldo awal	943.097.100
Reklasifikasi masuk	831.972.000
Koreksi susulan	406.250.000
Mutasi kurang:	1.307.172.000
Reklasifikasi keluar	880.922.000
Koreksi pencatatan	426.250.000
Saldo per 30 September 2024	13.275.880.497
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2024	(7.797.280.703)
Nilai Buku per 30 September 2024	5.478.599.794

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 September 2024 sebesar Rp13.275.880.497,00 berasal dari satker BPSDM Hukum dan HAM.

C.13 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya

Rp3.176.728.792,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp3.176.728.792,00.

Saldo per 01 Januari 2024	3.215.178.792
Mutasi tambah:	-
Pembelian	-
Mutasi kurang:	38.450.000
Penghentian aset dari penggunaan	38.450.000
Saldo per 30 September 2024	3.176.728.792
Akumulasi Penyusutan s.d.30 September 2024	(1.511.800.000)
Nilai Buku per 30 September 2024	1.664.928.792

Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/kebudayaan.

Saldo Aset tetap Lainnya per 30 September 2024 sebesar Rp3.176.728.792,00 berasal dari :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp1.450.949.267,00;
- Satker Poltekim sebesar Rp830.088.800,00;
- Satker Poltekip sebesar Rp867.743.575,00;
- Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp7.983.150,00;
- Satker Balai Diklat Sulawesi Utara sebesar Rp19.964.000,00.

C.14 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp16.758.876.814,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp16.758.876.814,00 dan Rp26.675.304.285,00. Konstruksi dalam pengerjaan merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca, terdapat pada satker BPSDM Hukum dan HAM berupa pembangunan Gedung Rektorat kampus politeknik di Tangerang.

C.15 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Rp154.765.638.043,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp154.765.638.043,00 dan Rp144.648.414.799,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30

September 2024, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	126.737.952.828	87.389.404.138	39.348.548.690
2	Gedung dan Bangunan	410.958.372.045	58.067.153.202	352.891.218.843
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	13.275.880.497	7.797.280.703	5.478.599.794
4	Aset Tetap Lainnya	3.176.728.792	1.511.800.000	1.664.928.792
Total		554.148.934.162	154.765.638.043	399.383.296.119

C.16 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp3.128.855.133,00

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.128.855.133,00 dan Rp3.157.897.433,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan terdapat pada lampiran. Rincian Aset Tak Berwujud per 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 September 2024

No.	Uraian	Nilai
1	Software Komputer	Rp 3.128.855.133
2	ATB Lainnya	Rp -
Jumlah Nilai Perolehan per 30 September 2024		Rp 3.128.855.133

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2024	Rp 3.157.897.433
Mutasi tambah:	Rp -
Pengembangan Apk	Rp -
Pembelian	Rp -
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp -
Mutasi kurang:	Rp 29.042.300
Penghentian ATB dari Penggunaan	Rp 29.042.300
Saldo per 30 September 2024	Rp 3.128.855.133
Amortisasi s.d 30 September 2024	Rp (2.703.636.333)
Nilai Buku per 30 September 2024	Rp 425.218.800

Mutasi kurang sebesar Rp29.042.300,00 terdapat pada Satker Badiklat Kepulauan Riau berupa Penghentian Aset Tak Berwujud (ATB) pada Aplikasi CoP (*Community of Practice*) dari penggunaan.

Saldo Aset Tak Berwujud per 30 September 2024 sebesar Rp3.128.855.133,00 berasal dari :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp1.476.732.100,00;
- Satker Poltekim sebesar Rp652.865.033,00;
- Satker Poltekip sebesar Rp774.458.000,00;
- Satker Balai Diklat Kepulauan Riau sebesar Rp40.000.000,00;
- Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp140.750.000,00;
- Satker Balai Diklat Sulawesi Utara sebesar Rp44.050.000,00.

C.17 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

*Dana Yang
Dibatasi
Penggunaannya
Rp0,00*

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya berasal dari dana yang ditentukan untuk membiayai belanja modal yang merupakan hak pemerintah dalam hal ini berasal dari RPATA sebesar Nilai dana yang dibatasi penggunaannya per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 Rp0,00 dan Rp12.391.866.906,00.

C.18 Aset Lain-Lain

*Aset Lain-Lain
Rp9.327.849.337,00*

Saldo Aset Lain-lain per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp9.327.849.337,00 dan Rp8.053.909.538,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPSDM Hukum dan HAM serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Rincian Aset Lain-Lain Berdasarkan Jenis Aset TA 2024 dan 2023

Jenis Aset	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah	9.327.849.337	8.053.909.538
Jumlah Belanja	9.327.849.337	8.053.909.538

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2024	8.053.909.538
Mutasi tambah:	5.066.806.867
Reklasifikasi dari Aset Tetap	3.819.176.867
Penghapusan	174.800.000
Penghentian aset dari penggunaan	1.072.830.000
Mutasi kurang:	3.792.867.068
Pencatatan barang yang mau dihapuskan	3.629.625.068
Penggunaan kembali aset yang sudah dihentikan penggunaan aktif	163.242.000
Saldo per 30 September 2024	9.327.849.337
Akumulasi Penyusutan 30 September 2024	(9.083.847.073)
Nilai Buku per 30 September 2024	244.002.264

Mutasi tambah aset lain-lain sebesar Rp5.066.806.867,00 terdapat pada:

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp1.072.830.000,00;
- Satker Poltekim sebesar Rp3.265.924.872,00;
- Satker Poltekip sebesar Rp174.800.000,00;
- Satker Balai Diklat Kepulauan Riau sebesar Rp434.608.495,00;
- Satker Badiklat Jawa Tengah sebesar Rp118.643.500,00.

Mutasi kurang aset lain-lain sebesar Rp3.792.867.068,00 terdapat pada :

- Satker BPSDM sebesar Rp3.216.136.568,00 atas Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan sebesar Rp3.052.894.568 dan Penggunaan kembali BMN yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif sebesar Rp163.242.000,00;
- Satker Poltekim sebesar Rp576.730.500,00 berupa Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan.

Saldo Aset Lain-Lain per 30 September 2024 sebesar Rp9.327.849.337,00 berasal dari :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp2.649.718.096,00;
- Satker Poltekim sebesar Rp4.325.777.608,00;
- Satker Poltekip sebesar Rp1.759.996.512,00;
- Satker Balai Diklat Kepulauan Riau sebesar Rp434.608.495,00;
- Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp39.105.126,00;
- Satker Balai Diklat Sulawesi Utara sebesar Rp118.643.500,00.

C.19 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp11.787.483.406,
00

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp11.787.483.406,00 dan Rp10.499.810.188,00. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	3.128.855.133	2.703.636.333	425.218.800
Jumlah		3.128.855.133	2.703.636.333	425.218.800
B	Aset Lainnya	9.327.849.337	9.083.847.073	244.002.264
Jumlah		9.327.849.337	9.083.847.073	244.002.264
Total		12.456.704.470	11.787.483.406	669.221.064

C.20 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN
Rp762.770.897,00

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp762.770.897,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.21 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp5.879.133.839,00

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp5.879.133.839,00 dan Rp5.386.205.244,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang Kepada Pihak Ketiga terdiri dari Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar berupa belanja listrik, belanja air dan belanja telepon bulan Desember 2022 yang tagihannya diterima pada Januari 2023.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	2.326.592.164
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	1.625.940.543
3	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	1.926.601.132
Total		Rp 5.879.133.839

1. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar (212111) sebesar Rp2.326.592.164,00 pada :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp1.263.300.178,00 merupakan belanja gaji pegawai yang sudah SPM di September untuk pembayaran bulan Oktober;
- Satker POLTEKIM sebesar Rp426.251.955,00 belanja gaji pegawai yang sudah SPM di September untuk pembayaran bulan Oktober namun SP2D terbit pada tanggal 01 Oktober 2024;
- Satker POLTEKIP sebesar Rp379.828.996,00 belanja gaji pegawai yang sudah SPM di September untuk pembayaran bulan Oktober namun SP2D terbit pada tanggal 01 Oktober 2024;
- Satker Balai Diklat Kepulauan Riau sebesar Rp93.037.619,00 merupakan belanja Gaji Induk PNS Bulan Oktober 2024 dan gaji susulan 1 orang pegawai bulan Oktober yang SPM September namun SP2D terbit Oktober 2024;
- Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp105.068.221,00 merupakan belanja belanja Gaji Induk PNS Bulan Oktober yang sudah SPM di September namun SP2D terbit pada tanggal 01 Oktober 2024;
- Satker Balai Diklat Sulawesi Utara sebesar Rp59.105.195,00 merupakan belanja belanja Gaji Induk PNS Bulan Oktober yang sudah SPM di September namun SP2D terbit pada tanggal 01 Oktober 2024;

2. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar (212112) sebesar Rp1.625.940.543,00 pada :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp326.137.000,00 merupakan LS Bendahara atas belanja kontraktual dan non kontraktual yang belum SP2D.

- Satker POLTEKIM sebesar Rp870.453.543,00 merupakan merupakan LS bendahara atas belanja uang saku Taruna;
 - Satker POLTEKIP sebesar Rp291.950.000,00 merupakan LS bendahara atas belanja uang perjalanan dinas.
 - Satker Balai Diklat Kepulauan Riau sebesar Rp50.400.000,00 merupakan Honor PPNPN Bulan September Tahun 2024 untuk 12 Pegawai Berdasarkan SK No. W.32.SDM.7-130.UM.05.02 Tahun 2024 Tanggal 28 Juni 2024 dengan Nomor SPM: 00180T/409155/2024 terbit pada Tanggal 24 September 2024 namun SP2D terbit pada tanggal 1 Oktober 2024;
 - Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp87.000.000,00 merupakan belanja Honor PPNPN Bulan Oktober Tahun 2024 yang SPM nya terbit September namun SP2D terbit pada tanggal 01 Oktober 2024.
3. Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191) senilai Rp1.926.601.132,00 terdapat pada :
- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp1.901.216.545,00;
 - Satker POLTEKIP sebesar Rp7.321.182,00;
 - Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp18.063.405,00;

*Utang yang Belum
Diterima
Tagihannya
Rp1.804.505.843,00*

C.22 Utang yang Belum Diterima Tagihannya

Utang yang Belum Diterima Tagihannya per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.804.505.843,00 dan Rp0,00. Utang yang belum ditagihkan merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

C.23 Pendapatan Diterima di Muka

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp0,00*

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar dan Rp0,00 dan Rp61.548.675,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.

C.24 Utang Jangka Pendek Lainnya

*Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp1.120.035,00*

Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.120.035,00 dan Rp0,00. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayarkan kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

C.25 Ekuitas

*Ekuitas
Rp1.500.755.807.
163,00*

Ekuitas per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.500.755.807.163,00 dan Rp1.494.896.543.769,00.

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Pendapatan PNB
Rp1.550.261.453,00

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah sebesar Rp1.550.261.453,00 dan Rp1.062.723.150,00 Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2024 dan 2023

AKUN	URAIAN	TA 2024	TA 2023
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	281.897.556	152.228.573
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	906.300.000	906.300.000
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	4.194.577
425811	Pendapatan dari Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	362.063.897	-
Jumlah	Jumlah	1.550.261.453	1.062.723.150

Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak antara lain:

- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131) sebesar Rp281.897.556,00 terdapat pada:
 - a. Satker BPSDM sebesar Rp253.494.657,00;
 - b. Satker Poltekim sebesar Rp34.881,00;
 - c. Satker Poltekip sebesar Rp28.368.018,00;
- Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan (425421) sebesar Rp906.300.000,00 terdapat pada satker BPSDM Hukum dan HAM atas pelaksanaan pelatihan penyusun dan perancang undang-undang.
- Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811) sebesar Rp362.063.897,00 terdapat pada :
 - a. Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp355.475.097,00 merupakan potongan SPM atas pembayaran belanja barang;
 - b. Satker POLTEKIM sebesar Rp1.388.800,00;
 - c. Satker Badiklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebesar Rp5.200.000,00.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Beban Pegawai
Rp31.162.096.027,00

Jumlah Beban Pegawai pada 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp31.162.096.027,00 dan Rp28.338.036.127,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai

TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023
Beban Gaji Pokok PNS	20.724.239.100	19.327.549.160
Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	-6.373.200	-
Beban Pembulatan Gaji PNS	319.510	319.658
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-10.716	-3.985
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1.307.231.890	1.195.544.620
Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-637.320	-
Beban Tunj. Anak PNS	360.975.323	321.858.886
Beban Tunj. Struktural PNS	474.345.000	480.010.000
Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	-	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	2.349.938.000	2.292.965.000
Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	-370.000	-
Beban Tunj. PPh PNS	295.078.251	125.548.950
Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	-289.680	-
Beban Tunj. Beras PNS	992.765.560	985.925.880
Beban Uang Makan PNS	2.332.879.000	2.331.308.000
Beban Tunjangan Umum PNS	463.215.000	491.110.000
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	-6.500.000	-1.480.042
Beban Uang Lembur	1.184.107.000	787.380.000
Belanja Gaji Pokok PPPK	510.117.600	-
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.793	-
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	17.053.600	-
Belanja Tunjangan Anak PPPK	4.534.400	-
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	49.400.000	-
Belanja Tunjangan Beras PPPK	20.856.960	-
Belanja Uang Makan PPPK	77.613.000	-
Belanja Uang Lembur PPPK	11.602.000	-
Jumlah	31.162.096.071	28.338.036.127

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp1.217.294.505,00

Jumlah Beban Persediaan pada 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.217.294.505,00 dan Rp731.068.644,00.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan pada 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Persediaan
TA 2024 dan TA 2023

URAIAN JENIS BEBAN	Realisasi 2024	Realisasi 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	1.217.294.505	731.068.644	66,51
Jumlah Beban Persediaan	1.217.294.505	731.068.644	66,51

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang
dan Jasa
Rp90.007.287.285,
00

Beban barang dan jasa pada 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp90.007.287.285,00 dan Rp108.312.646.067,00.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa pada 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2024 dan 2023**

URAIAN	TA 2024	TA 2023	% Naik (TURUN)
Beban Keperluan Perkantoran	17.948.671.164	12.137.294.189	48
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.086.000	1.895.670	(43)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	384.312.000	695.220.000	(45)
Beban Barang Operasional Lainnya	1.232.621.970	852.181.234	45
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COV	-	67.521.400	(100)
Beban Bahan	23.095.936.737	23.952.782.895	(4)
Pengembalian Beban Bahan	-	(2.371.000)	(100)
Beban Honor Output Kegiatan	763.872.000	868.004.000	(12)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	24.284.595.223	48.460.984.662	(50)
Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi C	-	77.099.051	(100)
Beban Langganan Listrik	3.569.508.506	3.008.888.238	19
Beban Langganan Telepon	13.741.857	11.036.917	25
Beban Langganan Air	185.980.600	85.562.600	117
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3.458.009.088	2.950.173.158	17
Beban Sewa	5.724.201.138	5.823.712.220	(2)
Beban Jasa Profesi	8.514.970.000	8.832.897.742	(4)
Beban Jasa Lainnya	559.181.002	168.850.261	231
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	4.971.000	(100)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	270.600.000	315.941.830	-
Jumlah	90.007.287.285	108.312.646.067	(17)

D.5 Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp12.294.336.791,
00*

Beban pemeliharaan pada 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp12.294.336.791,00 dan Rp7.458.931.990,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2024 dan 2023**

URAIAN	REALISASI 2024	REALISASI 2023	% NAIK (TURUN)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.079.166.584	4.708.846.844	93
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	828.134.993	227.627.900	73
Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	-	(5.026.570)	100
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.948.646.968	2.445.379.831	(25)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	438.388.246	82.103.985	81
Jumlah	12.294.336.791	7.458.931.990	65

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp27.251.992.091,
00*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp27.251.992.091,00 dan Rp38.798.405.790,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2024 dan TA 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	Realisasi 2024	Realisasi 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Perjalanan Biasa	24.322.423.221	35.089.380.771	-30,68
Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	-200.000	-4.498.000	-95,55
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	187.769.000	231.930.000	-19,04
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.741.999.870	3.481.785.463	-21,25
Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	-192.444	-100,00
Jumlah	27.251.992.091	38.798.405.790	-29,76

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0,00*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah sebesar Rp0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Beban Bantuan
Sosial
Rp0,00*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp14.904.564.984,
00*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp14.904.564.984,00 dan Rp13.678.949.278,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai

suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2024 dan TA 2023*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Realisasi 2024	Realisasi 2023	% Naik (TURUN)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	8.316.709.599	7.978.571.209	4,2
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.405.441.168	4.774.010.955	13,2
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	433.285.455	573.834.976	(24,5)
Beban Penyusutan Irigasi	13.157.354	9.904.429	32,8
Beban Penyusutan Jaringan	418.038.714	5.078.125	8.132,1
Beban Amortisasi Software	279.554.784	293.122.570	(4,6)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	3.630.287	-	100,0
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	34.747.623	44.427.014	(21,8)
Jumlah	14.904.564.984	13.678.949.278	9,0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp1.647.600,00*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.647.600,00 dan Rp0,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
TA 2024 dan TA 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	Realisasi 2024	Realisasi 2023	% Naik (TURUN)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	1.647.600	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	-	-	-
Jumlah	1.647.600	-	100%

D.11 BEBAN LAIN-LAIN

*Beban Lain-lain
Rp0,00*

Jumlah Beban Lain-lain untuk 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Lain-

lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.12 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp302.752.532,00

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp302.752.532,00 terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	Realisasi 2024	Realisasi 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	180.060.099	94.897.664	89,74
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	1.293.864.566	-100,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	122.692.433	454.720.803	-73,02
Beban dari Keg. Non Operasional Lainnya	-	-	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	302.752.532	-744.246.099	140,68

*) *Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2021.*

Realisasi Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang diperoleh sebesar Rp302.752.532,00 terdapat pada :

a. Satker BPSDM Hukum dan HAM terdiri atas :

- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122) sebesar Rp65.755.000,00 berupa lelang peralatan dan mesin;
- Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (425129) sebesar Rp114.305.000,00 berupa lelang 3 buah mini bus;
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (425911) sebesar Rp13.964.000,00 merupakan pengembalian belanja pegawai pada pengembalian belanja gaji induk atas nama Wirdah Rahmi;

b. Satker Poltekim sebesar Rp70.114.000,00 merupakan

Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (425791).

- c. Satker Poltekip sebesar Rp4.091,00 merupakan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (425911) berupa Komponen kekurangan KGB/ Gaji.
- d. Satker Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah sebesar Rp33.842.342,00 merupakan Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (425912) atas Pegembalian belanja Sewa Mobil dan Kelebihan belanja Pemeliharaan.
- e. Satker Balai Diklat Sulawesi Utara sebesar Rp1.868.000,00 merupakan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (425911) atas Komponen kekurangan KGB/ Gaji dan Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (425913) sebesar Rp2.900.000,00.

D.13 POS-POS LUAR BIASA

*Pos-Pos Luar
Biasa
Rp0,00*

Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas.

	E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
<i>Ekuitas Awal</i>	E.1 Ekuitas Awal
<i>Rp1.494.896.543.769,00</i>	Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.494.896.543.769,00 dan Rp1.454.096.342.965,00.
	E.2 Surplus/Defisit LO
<i>Surplus/Defisit LO</i>	Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah defisit sebesar (Rp174.982.910.098,00) dan (Rp196.999.560.845,00). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
<i>(Rp174.982.910.098,00)</i>	
<i>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar</i>	E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
<i>Rp0,00</i>	Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 sebesar Rp0,00.
	E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset
<i>Penyesuaian Nilai Aset</i>	Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.
<i>Rp0,00</i>	
	E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan
<i>Koreksi Nilai Persediaan</i>	Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah sebesar Rp0,00.
<i>Rp0,00</i>	
	E.3.3 Koreksi Reklasifikasi Aset
<i>Koreksi Reklasifikasi Aset</i>	Reklasifikasi aset adalah pemindahan kelompok asset tetap ke asset lainnya. Koreksi reklasifikasi aset untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah sebesar Rp0,00.
<i>Rp0,00</i>	

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset
Rp0,00

Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset. Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah sebesar Rp0,00.

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
Rp89.138.314,00

Koreksi Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah sebesar Rp89.138.314,00 dan Rp216.405.631,00. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan penyusutan transaksional atas koreksi nilai bertambah jalan khusus kompleks, dengan rincian sebagai berikut:

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain
Rp0,00

Koreksi Lain-Lain untuk periode 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah sebesar Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
Rp180.931.311.806,00

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp180.931.311.806,00 dan Rp187.139.538.645,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(2.120.798.539)
Ditagihkan ke Entitas Lain	181.829.367.627
Transfer Masuk	1.239.782.143
Transfer Keluar	(17.039.425)
Jumlah	180.931.311.806

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

<i>DDEL/DKEL</i>	Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan
<i>(Rp2.120.798.539</i>	transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang
<i>00)/</i>	melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 September 2024,
<i>Rp181.829.367.627,</i>	DDEL sebesar (Rp2.120.798.539,00) sedangkan DKEL sebesar
<i>00</i>	Rp181.829.367.627,00.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

<i>Transfer</i>	Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban
<i>Masuk/Transfer</i>	dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL
<i>Keluar</i>	dengan BA-BUN.
<i>Rp1.239.782.143,00</i>	Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 September 2024 sebesar
<i>/ Rp17.039.425,00</i>	Rp1.239.782.143,00 sedangkan Transfer Keluar sebesar
	Rp17.039.425,00.

E.5 Ekuitas Akhir

<i>Ekuitas Akhir</i>	Nilai ekuitas pada 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah
<i>Rp1.500.755.807.</i>	masing-masing sebesar Rp1.500.755.807.163,00 dan
<i>163,00</i>	Rp1.444.452.726.396,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Tanah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM sudah terkoreksi sebesar 3.420 m² akibat pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari tetapi belum tercatat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Terkait penggantian tol dengan nilai appraisal sebesar Rp25.248.900.000,00. Saat ini masih dalam tahap perencanaan pembangunan dan penunjukan konsultan perencanaan pembangunan.
2. BPSDM Hukum dan HAM sedang melakukan proses peralihan nama sertifikat tanah untuk memenuhi ketentuan sertifikat, saat ini masih dalam proses menunggu berita acara hasil pengukuran tanah BPSDM Hukum dan HAM yang telah dilakukan oleh BPN Depok.
3. Aset tanah pada BPSDM Hukum dan HAM yang Sertifikatnya Belum Bersertifikat Sesuai Ketentuan (BBSK) atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan HAM dilakukan koordinasi ke BPN Depok untuk dilakukan permohonan pengukuran ulang melalui surat Nomor SDM.1-PB.04.01-02 tanggal 14 Maret 2023.

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tgl Data : 17/10/24 6:23 AM
Tgl Cetak : 17/10/24 9:05 AM
Halaman : 1
lap_neraca_es1_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	762,770,897	0	762,770,897	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	1,927,721,167	0	1,927,721,167	0.00
Piutang Bukan Pajak	186,800	329,520,029	(329,333,229)	(99.94)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(1,647,600)	1,647,600	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	186,800	327,872,429	(327,685,629)	(99.94)
Persediaan	701,196,916	399,048,889	302,148,027	75.72
JUMLAH ASET LANCAR	3,391,875,780	726,921,318	2,664,954,462	366.61
ASET TETAP				
Tanah	1,089,000,068,000	1,089,000,068,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	126,737,952,828	121,589,324,040	5,148,628,788	4.23
Gedung dan Bangunan	410,958,372,045	378,280,318,966	32,678,053,079	8.64
Jalan, Irigasi dan Jaringan	13,275,880,497	12,401,733,397	874,147,100	7.05
Aset Tetap Lainnya	3,176,728,792	3,215,178,792	(38,450,000)	(1.20)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	16,758,876,814	26,675,304,285	(9,916,427,471)	(37.17)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(154,765,638,043)	(144,648,414,799)	(10,117,223,244)	6.99
JUMLAH ASET TETAP	1,505,142,240,933	1,486,513,512,681	18,628,728,252	1.25
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	3,128,855,133	3,157,897,433	(29,042,300)	(0.92)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	0	12,391,866,906	(12,391,866,906)	(100.00)
Aset Lain-lain	9,327,849,337	8,053,909,538	1,273,939,799	15.82
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(11,787,483,406)	(10,499,810,188)	(1,287,673,218)	12.26
JUMLAH ASET LAINNYA	669,221,064	13,103,863,689	(12,434,642,625)	(94.89)
JUMLAH ASET	1,509,203,337,777	1,500,344,297,688	8,859,040,089	0.59
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	5,879,133,839	5,386,205,244	492,928,595	9.15
Utang Yang Belum Ditagihkan	1,804,505,843	0	1,804,505,843	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	0	61,548,675	(61,548,675)	(100.00)
Uang Muka dari KPPN	762,770,897	0	762,770,897	0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	1,120,035	0	1,120,035	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	8,447,530,614	5,447,753,919	2,999,776,695	55.06
JUMLAH KEWAJIBAN	8,447,530,614	5,447,753,919	2,999,776,695	55.06
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,500,755,807,163	1,494,896,543,769	5,859,263,394	0.39
JUMLAH EKUITAS	1,500,755,807,163	1,494,896,543,769	5,859,263,394	0.39

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tgl Data : 17/10/24 6:23 AM
Tgl Cetak : 17/10/24 9:05 AM
Halaman : 2
lap_neraca_es1_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH EKUITAS	1,500,755,807,163	1,494,896,543,769	5,859,263,394	0.39
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,509,203,337,777	1,500,344,297,688	8,859,040,089	0.59

Keterangan :
FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 30 SEPTEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tgl Data : 17/10/24 6:23 AM

Tgl Cetak : 17/10/24 9:05 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	722,800,000	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	39,970,897	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1,927,721,167	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	186,800	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	594,571,111	0
0.0	117112	Amunisi	4,400,000	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	102,225,805	0
0.0	131111	Tanah	1,089,000,068,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	126,737,952,828	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	410,958,372,045	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	10,390,995,097	0
0.0	134112	Irigasi	831,972,000	0
0.0	134113	Jaringan	2,052,913,400	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	3,176,728,792	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	16,758,876,814	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	87,389,404,138
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	58,067,153,202
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	6,454,416,508
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	174,104,325
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	1,168,759,870
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	1,511,800,000
0.0	162151	Software	3,128,855,133	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	9,327,849,337	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	9,083,847,073
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	2,703,636,333
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	2,326,592,164
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	1,625,940,543
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	1,926,601,132
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	1,804,505,843
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	762,770,897
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	1,120,035
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	181,829,367,627
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	2,120,798,539	0
0.0	313211	Transfer Keluar	17,039,425	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	1,239,782,143
0.0	391111	Ekuitas	0	1,494,896,543,769
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	89,138,314	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	65,755,000

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 30 SEPTEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI

: (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tgl Data : 17/10/24 6:23 AM

Tgl Cetak : 17/10/24 9:05 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	114,305,099
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	281,897,556
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	906,300,000
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	70,114,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	362,063,897
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	15,836,091
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	33,842,342
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,900,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	20,717,865,900	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	308,750	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,306,594,570	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	360,975,323	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	474,345,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2,349,568,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPH PNS	295,078,251	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	992,475,880	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	2,332,879,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	456,715,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	510,117,600	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	5,793	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	17,053,600	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	4,534,400	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	49,400,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	20,856,960	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	77,613,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	1,184,107,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	11,602,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	17,948,671,164	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,086,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	384,312,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,232,621,970	0
3.0	521211	Beban Bahan	23,095,936,737	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	763,872,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	24,284,595,223	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	270,600,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	3,569,508,506	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	13,741,857	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 30 SEPTEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tgl Data : 17/10/24 6:23 AM
Tgl Cetak : 17/10/24 9:05 AM
Halaman : 3
lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522113	Beban Langganan Air	185,980,600	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,458,009,088	0
3.0	522141	Beban Sewa	5,724,201,138	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	8,514,970,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	559,181,002	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9,079,166,584	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	828,134,993	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,948,646,968	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	24,322,223,221	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	187,769,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,741,999,870	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	8,316,709,599	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5,405,441,168	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	433,285,455	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	13,157,354	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	418,038,714	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	279,554,784	0
3.0	592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	3,630,287	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	34,747,623	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,217,294,505	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	438,388,246	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	1,647,600
JUMLAH			1,854,821,007,187	1,854,821,007,187

Keterangan :
FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 30 SEPTEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tgl Data : 17/10/24 6:23 AM

Tgl Cetak : 17/10/24 9:06 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	181,829,367,627
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	2,120,798,539	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	65,755,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	114,305,099
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	220,348,881
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	906,300,000
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	70,114,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	362,063,897
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	15,649,291
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	35,022,593
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	331,239,778
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	18,975,723,080	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	295,781	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,197,174,970	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	330,575,424	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	439,125,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,153,326,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	288,528,123	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	908,388,210	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	2,332,879,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	423,625,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	446,352,900	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4,995	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	14,921,900	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	3,967,600	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	43,225,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	18,249,840	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	77,613,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	1,184,107,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	11,602,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	17,605,023,118	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,086,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	384,312,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,231,106,970	0
3.0	521211	Belanja Bahan	21,542,805,217	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	763,872,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	23,671,318,559	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 30 SEPTEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tgl Data : 17/10/24 6:23 AM
Tgl Cetak : 17/10/24 9:06 AM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_kas_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	270,600,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	572,179,572	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	332,298,893	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	3,973,217,818	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	15,385,298	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	202,776,400	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,433,692,598	0
3.0	522141	Belanja Sewa	5,703,479,358	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	8,288,520,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	558,081,002	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8,975,092,350	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	893,165,024	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	828,134,993	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,940,246,968	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11,362,130	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23,939,142,478	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	187,769,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,741,999,870	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7,686,110,105	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16,792,047,521	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	449,238,522	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	6,373,200
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	10,760
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	637,320
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	370,000
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	289,680
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	6,500,000
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	200,000
JUMLAH			183,964,547,126	183,964,547,126

Keterangan :
FINAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 12

Tgl Data : 17/10/24 12:39 AM
Tgl Cetak : 17/10/24 9:05 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_es1_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	996,300,000	2,120,798,539	1,124,498,539	213	1,078,539,000	1,511,599,550	(433,060,550)	140
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	996,300,000	2,120,798,539	1,124,498,539	213	1,078,539,000	1,511,599,550	(433,060,550)	140
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	996,300,000	2,120,798,539	1,124,498,539	213	1,078,539,000	1,511,599,550	(433,060,550)	140
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	322,216,750,000	181,829,367,627	(140,387,382,373)	56	305,612,291,000	188,651,138,195	116,961,152,805	62
1. Belanja Pegawai	38,139,257,000	28,835,503,863	(9,303,753,137)	76	34,482,478,000	26,260,913,299	8,221,564,701	76
2. Belanja Barang	193,944,715,000	128,066,467,616	(65,878,247,384)	66	214,121,813,000	151,143,800,836	62,978,012,164	71
3. Belanja Modal	90,132,778,000	24,927,396,148	(65,205,381,852)	28	57,008,000,000	11,246,424,060	45,761,575,940	20
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 12

Tgl Data : 17/10/24 12:39 AM
Tgl Cetak : 17/10/24 9:05 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_es1_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	322,216,750,000	181,829,367,627	(140,387,382,373)	56	305,612,291,000	188,651,138,195	116,961,152,805	62
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 17/10/24 9:06 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	21,193,335,000	24,454,482,000	18,975,723,080	6,373,200	18,969,349,880	77.57	5,485,132,120
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	475,000	383,000	295,781	10,760	285,021	74.42	97,979
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,584,817,000	1,554,630,000	1,197,174,970	637,320	1,196,537,650	76.97	358,092,350
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	375,241,000	432,122,000	330,575,424	0	330,575,424	76.5	101,546,576
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,012,130,000	543,635,000	439,125,000	0	439,125,000	80.78	104,510,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,884,449,000	2,732,479,000	2,153,326,000	370,000	2,152,956,000	78.79	579,523,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	123,263,000	341,071,000	288,528,123	0	288,528,123	84.59	52,542,877
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,220,965,000	1,138,843,000	908,388,210	289,680	908,098,530	79.74	230,744,470
511129	Belanja Uang Makan PNS	4,878,296,000	3,655,028,000	2,332,879,000	0	2,332,879,000	63.83	1,322,149,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	813,722,000	540,441,000	423,625,000	6,500,000	417,125,000	77.18	123,316,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	33,086,693,000	35,393,114,000	27,049,640,588	14,180,960	27,035,459,628	76.39	8,357,654,372
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	637,648,000	446,352,900	0	446,352,900	70	191,295,100
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	9,000	4,995	0	4,995	55.5	4,005
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	21,318,000	14,921,900	0	14,921,900	70	6,396,100
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	5,668,000	3,967,600	0	3,967,600	70	1,700,400
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	61,750,000	43,225,000	0	43,225,000	70	18,525,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	26,072,000	18,249,840	0	18,249,840	70	7,822,160
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	144,872,000	77,613,000	0	77,613,000	53.57	67,259,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	897,337,000	604,335,235	0	604,335,235	67.35	293,001,765
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	1,680,826,000	1,681,766,000	1,184,107,000	0	1,184,107,000	70.41	497,659,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	167,040,000	11,602,000	0	11,602,000	6.95	155,438,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	1,680,826,000	1,848,806,000	1,195,709,000	0	1,195,709,000	64.67	653,097,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	34,767,519,000	38,139,257,000	28,849,684,823	14,180,960	28,835,503,863	75.61	9303753137
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	24,420,428,000	25,361,495,000	17,605,023,118	0	17,605,023,118	69.42	7,756,471,882
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	35,740,000	24,500,000	1,086,000	0	1,086,000	4.43	23,414,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	591,960,000	628,412,000	384,312,000	0	384,312,000	61.16	244,100,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,480,187,000	1,631,516,000	1,231,106,970	0	1,231,106,970	75.46	400,409,030
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	26,528,315,000	27,645,923,000	19,221,528,088	0	19,221,528,088	69.53	8,424,394,912
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	35,387,792,000	37,065,896,000	21,542,805,217	0	21,542,805,217	58.12	15,523,090,783

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 17/10/24 9:06 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,439,574,000	1,536,548,000	763,872,000	0	763,872,000	49.71	772,676,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	30,312,084,000	30,745,374,000	23,671,318,559	0	23,671,318,559	76.99	7,074,055,441
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	278,100,000	270,600,000	0	270,600,000	97.3	7,500,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	67,139,450,000	69,625,918,000	46,248,595,776	0	46,248,595,776	66.42	23,377,322,224
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	965,106,000	995,183,000	572,179,572	0	572,179,572	57.49	423,003,428
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	735,035,000	664,800,000	332,298,893	0	332,298,893	49.98	332,501,107
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	1,700,141,000	1,659,983,000	904,478,465	0	904,478,465	54.49	755,504,535
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	5,136,000,000	5,142,000,000	3,973,217,818	0	3,973,217,818	77.27	1,168,782,182
522112	Belanja Langganan Telepon	18,720,000	27,000,000	15,385,298	0	15,385,298	56.98	11,614,702
522113	Belanja Langganan Air	515,600,000	258,000,000	202,776,400	0	202,776,400	78.6	55,223,600
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	5,408,230,000	5,560,912,000	3,433,692,598	0	3,433,692,598	61.75	2,127,219,402
522141	Belanja Sewa	5,864,656,000	7,328,086,000	5,703,479,358	0	5,703,479,358	77.83	1,624,606,642
522151	Belanja Jasa Profesi	13,001,900,000	15,411,116,000	8,288,520,000	0	8,288,520,000	53.78	7,122,596,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	348,300,000	997,722,000	558,081,002	0	558,081,002	55.94	439,640,998
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	30,293,406,000	34,724,836,000	22,175,152,474	0	22,175,152,474	63.86	12,549,683,526
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11,701,048,000	10,236,437,000	8,975,092,350	0	8,975,092,350	87.68	1,261,344,650
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	1,285,500,000	1,285,500,000	893,165,024	0	893,165,024	69.48	392,334,976
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1,788,000,000	1,138,000,000	828,134,993	0	828,134,993	72.77	309,865,007
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,110,400,000	3,212,950,000	1,940,246,968	0	1,940,246,968	60.39	1,272,703,032
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	80,000,000	80,000,000	11,362,130	0	11,362,130	14.2	68,637,870
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	16,964,948,000	15,952,887,000	12,648,001,465	0	12,648,001,465	79.28	3,304,885,535
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37,169,138,000	39,295,825,000	23,939,142,478	200,000	23,938,942,478	60.92	15,356,882,522
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	360,150,000	492,255,000	187,769,000	0	187,769,000	38.14	304,486,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,968,121,000	4,547,088,000	2,741,999,870	0	2,741,999,870	60.3	1,805,088,130
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	40,497,409,000	44,335,168,000	26,868,911,348	200,000	26,868,711,348	60.6	17,466,456,652
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	183,123,669,000	193,944,715,000	128,066,667,616	200,000	128,066,467,616	66.03	65878247384
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9,659,604,000	9,653,614,000	7,686,110,105	0	7,686,110,105	79.62	1,967,503,895
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	9,659,604,000	9,653,614,000	7,686,110,105	0	7,686,110,105	79.62	1,967,503,895
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I

: 013
: 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 17/10/24 9:06 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80,000,000,000	80,000,000,000	16,792,047,521	0	16,792,047,521	20.99	63,207,952,479
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	479,164,000	449,238,522	0	449,238,522	93.75	29,925,478
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	80,000,000,000	80,479,164,000	17,241,286,043	0	17,241,286,043	21.42	63,237,877,957
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	89,659,604,000	90,132,778,000	24,927,396,148	0	24,927,396,148	27.66	65205381852
	JUMLAH BELANJA	307,550,792,000	322,216,750,000	181,843,748,587	14,380,960	181,829,367,627	56.43	140,387,382,373

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 17/10/24 9:07 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	65,755,000	0	65,755,000	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	114,305,099	0	114,305,099	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	90,000,000	220,348,881	0	220,348,881	244.83
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	90,000,000	400,408,980	0	400,408,980	444.9
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	906,300,000	906,300,000	0	906,300,000	100
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	906,300,000	906,300,000	0	906,300,000	100
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	70,114,000	0	70,114,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	70,114,000	0	70,114,000	
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	362,063,897	0	362,063,897	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	362,063,897	0	362,063,897	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	15,649,291	0	15,649,291	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	35,022,593	0	35,022,593	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	331,239,778	0	331,239,778	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	381,911,662	0	381,911,662	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	996,300,000	2,120,798,539	0	2,120,798,539	212.87
	JUMLAH PENDAPATAN	996,300,000	2,120,798,539	0	2,120,798,539	212.87

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI

: (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tgl Data : 17/10/24 6:23 AM

Tgl Cetak : 17/10/24 9:04 AM

Halaman : 1

lap_lo_es1_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,550,261,453	1,062,723,150	487,538,303	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,550,261,453	1,062,723,150	487,538,303	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	1,550,261,453	1,062,723,150	487,538,303	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	31,162,096,027	28,338,036,127	2,824,059,900	-
Beban Persediaan	1,217,294,505	731,068,644	486,225,861	-
Beban Barang dan Jasa	90,007,287,285	108,312,646,067	(18,305,358,782)	-
Beban Pemeliharaan	12,294,336,791	7,458,931,990	4,835,404,801	-
Beban Perjalanan Dinas	27,251,992,091	38,798,405,790	(11,546,413,699)	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	-
Beban Bunga	0	0	0	-

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI

: (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tgl Data : 17/10/24 6:23 AM

Tgl Cetak : 17/10/24 9:04 AM

Halaman : 2

lap_lo_es1_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	14,904,564,984	13,678,949,278	1,225,615,706	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(1,647,600)	0	(1,647,600)	-
Beban Transfer	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	176,835,924,083	197,318,037,896	(20,482,113,813)	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(175,285,662,630)	(196,255,314,746)	20,969,652,116	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	180,060,099	(1,198,966,902)	1,379,027,001	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	180,060,099	94,897,664	85,162,435	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	1,293,864,566	(1,293,864,566)	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	122,692,433	454,720,803	(332,028,370)	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	122,692,433	454,720,803	(332,028,370)	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	302,752,532	(744,246,099)	1,046,998,631	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(174,982,910,098)	(196,999,560,845)	22,016,650,747	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(174,982,910,098)	(196,999,560,845)	22,016,650,747	-

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tgl Data : 17/10/24 6:23 AM

Tgl Cetak : 17/10/24 9:04 AM

Halaman : 1

lap_lpe_es1_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,494,896,543,769	1,454,096,342,965	40,800,200,804	2.81
SURPLUS/DEFISIT-LO	(174,982,910,098)	(196,999,560,845)	22,016,650,747	(11.18)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(89,138,314)	216,405,631	(305,543,945)	(141.19)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(89,138,314)	216,405,631	(305,543,945)	(141.19)
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	180,931,311,806	187,139,538,645	(6,208,226,839)	(3.32)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	5,859,263,394	(9,643,616,569)	15,502,879,963	(160.76)
EKUITAS AKHIR	1,500,755,807,163	1,444,452,726,396	56,303,080,767	3.9

Keterangan :

FINAL